

PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
BATU BENAU

KONSULTASI PUBLIK
RANWAL RPJPD
2025 - 2045

INOVASI
SAMUDRA DKP

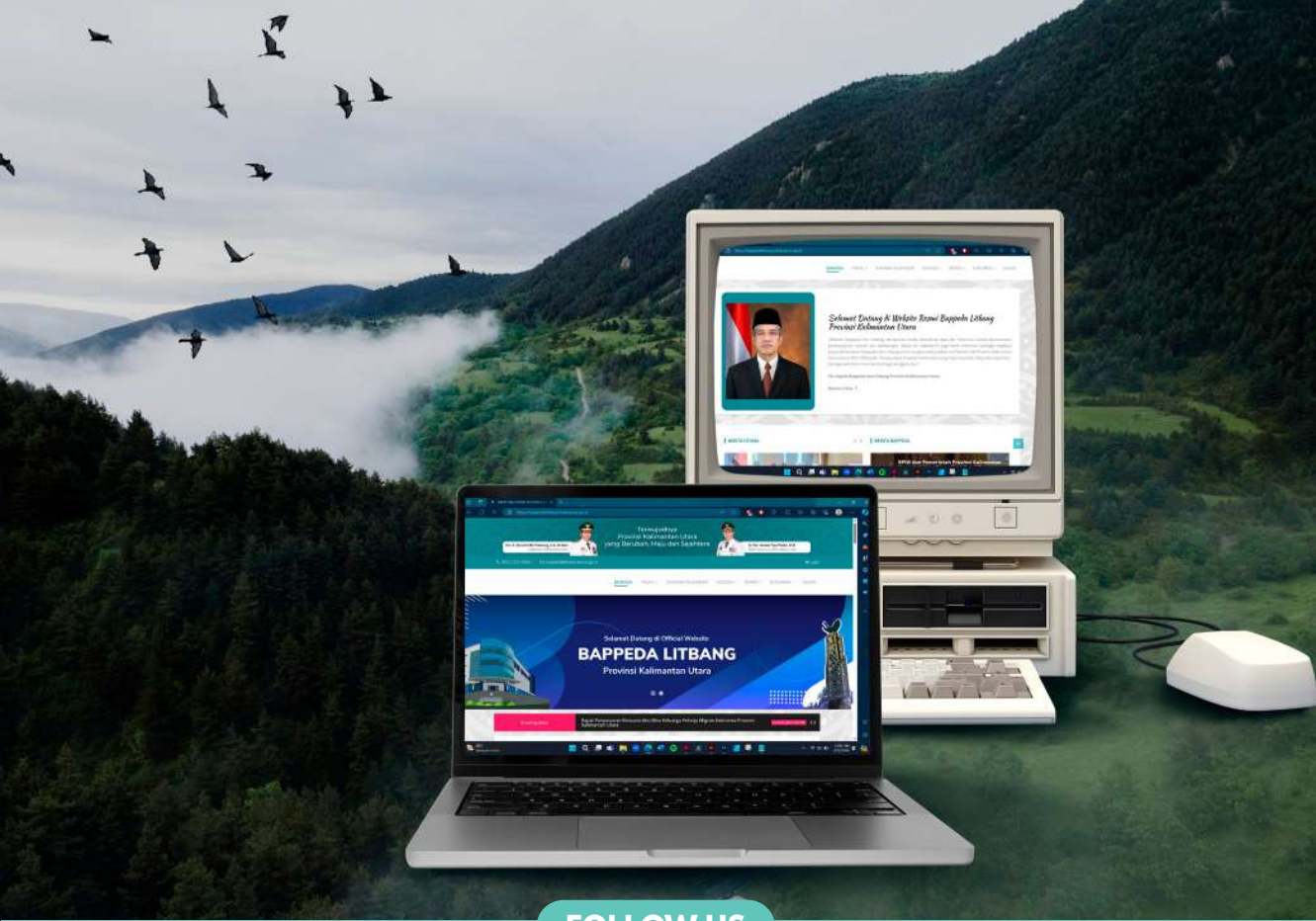
LENSA PEMBANGUNAN

BULETIN

EDISI 1 JANUARI - MARET 2024

PERKEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA





FOLLOW US

Official Social Media

— BAPPEDA & LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA —



bappedalitbang.kaltaraprov.go.id



[bappedalitbang_kaltara](https://www.instagram.com/bappedalitbang_kaltara)



[Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara](https://www.youtube.com/Bappeda%20Litbang%20Provinsi%20Kalimantan%20Utara)



TAJUK

Seraya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Lensa Pembangunan Edisi 14 ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi perdana tahun 2024, dengan semangat baru, Buletin Lensa Pembangunan menghadirkan berbagai informasi - informasi menarik kepada pembaca sekalian, seputar perencanaan dan inovasi di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini Lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Perkembangan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Indonesia mengembangkan strategi pembangunan yang didasarkan pada perencanaan pembangunan. Tim Redaksi merangkum dari berbagai sumber, perjalanan perkembangan perencanaan pembangunan yang dikembangkan di Indonesia.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti Konsultasi Publik Rancangan RPJPD 2025–2045, FGD Rencana Induk Pengembangan *Geopark*, serta Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi daerah Sistem Manajemen Komunikasi Data dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Samudra DKP) dan jalan-jalan menikmati keindahan Pantai Kayu Angin di Pulau Sebatik.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Selamat membaca!



Mochammad Sarkawi, S.Hut.M.Eng

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH

Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

EDITOR DAN FOTOGRAFER

Dian Suryanata, Fauzi Muhammad

PENULIS ARTIKEL

Linda Marlisa, Ady Setiawan, Retno Sawitri, Romih,
Novieka Fitriani, Lisa Olivia, Supazry Ramadhon

DESIGN GRAFIS

Puput Islamitha, Mustakim, Cristove Dismond

SEKRETARIAT

Humayati Fahriah, Dewi Erisna Utami

ALAMAT REDAKSI

Jl. Agathis, Gd. PUPR-PERKIM LT. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara

DAFTAR ISI

06. PERKEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA



14. LIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA GELAR KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RPJPD 2025 - 2045



18. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN GEOPARK BATU BENAU



20. ORIENTASI PENYUSUNAN RKPd PEMERINTAHAN PROVINSI KALTARA 2025



40. SEKILAS INFO



42. INOVASI DAERAH SISTEM MANAJEMEN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAMUDRA DKP)



44. POSTER POSYANDU PINTER



46. GINGERCOOKIES (COOKIES BERBAHAN DASAR JAHE DAYAK)



48. SIKANGURU SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN GURU



50. JELAJAH



52. POTRET RUANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP



54. MUATAN LOKAL





(SUMBER) Freepik

PERKEMBANGAN

Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Indonesia mengembangkan strategi pembangunan yang didasarkan pada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan bangsa. Kali ini Tim Redaksi merangkum dari berbagai sumber, perjalanan perkembangan perencanaan pembangunan yang dikembangkan di Indonesia.

Rencana Pembangunan Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama atau era Presiden Soekarno, strategi pembangunan didasarkan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional.

Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang-

bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan. Dan juga beberapa program lainnya.

1. Pembentukan *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari Menteri Kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
2. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi.



(FOTO) I.L. Kasimo bersama dengan Ir. Soekarno.



(SUMBER) Getty Image

3. Rencana Kasimo (Kasimo Plan). Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah : Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha, Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul, Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.

Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, intinya adalah tetap sektor publik.

Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.

Tugas biro ini merancang

pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

Tahun 1961-1969 berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP



(SUMBER) <https://kompasmedia-kompas.id>

MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Era Orde Baru

Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dolar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65 persen, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek, yang diarahkan

kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional di Indonesia didasari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN ini setiap lima tahun disusun oleh MPR dan dijalankan oleh presiden sebagai mandat MPR. Pada masa ini pembangunan terencana melalui konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang tertuang dalam GBHN.

1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut, fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha, dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas, untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Repelita I membawa

pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3 persen menjadi 6,7 persen per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8 persen pada akhir Repelita I pada tahun 1974. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984), fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di Masa Transisi Orde Baru- Reformasi

GBHN 1999-2004 mengamanatkan tujuan pembangunan nasional, kondisi umum, visi dan misi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Propenas Tahun 2000-2004 merupakan program 5 (lima) tahunan yang menjadi landasan dan pedoman bagi

Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, yang merupakan Undang-Undang hasil keputusan bersama antara DPR RI saat itu dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Propenas menggunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya (*strategic choices*). Isi Propenas mengutamakan dan menonjolkan agenda-agenda kebijakan penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi bangsa pada masa lima tahun ke depan. Pendekatan ini sejalan dengan keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis saat itu. Propenas kemudian dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daerah menjabarkan dengan menyusun Propeda yang

menjadi dasar kebijakan daerah lima tahunan yang akan menjadi acuan penyusunan Renstra Pemerintah Daerah, REPETADA dan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di Era Reformasi

Runtuhnya Orde Baru, yang disusul dengan amandemen UUD 1945, membawa konsekuensi berubahnya kedudukan MPR. MPR, yang semula sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain. MPR tidak lagi memilih presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal itu membawa konsekuensi bahwa presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab kepada MPR. Konsekuensi lainnya, GBHN tidak lagi ditetapkan oleh MPR.

Implikasi mendasar yang harus diantisipasi dalam sistem

perencanaan pembangunan adalah hilangnya GBHN yang selama ini mempunyai fungsi sebagai pemandu bagi arah perencanaan pembangunan. Tidak adanya GBHN merupakan akibat langsung dari hilangnya eksistensi lembaga tertinggi negara atau MPR. Oleh karena itu tidak akan ada lagi PROPENAS yang merupakan penjabaran dari GBHN, dan tidak akan ada lagi PROPEDA yang merupakan penjabaran dari PROPENAS.

Ketiadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era reformasi, telah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan UU No 17/2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Strategi pembangunan yang sesuai konteks Indonesia. Ekonomi Indonesia memadukan pendekatan sumber daya (*resources*), pengetahuan (*knowledge*), dan budaya (*culture*). Pertumbuhan ekonomi



(SUMBER) <https://www.viva.co.id/>

(FOTO) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu

yang dianut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, *growth with equality*, agar benar-benar membawa rasa adil. Ekonomi dalam negeri yang berdimensi kewilayahan, daerah-daerah menjadi kekuatan ekonomi lokal. Dengan strategi pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-rakyat miskin, dan pro-lingkungan diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional.

RPJP Nasional ini merupakan, dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5

(lima) tahunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah di luar pulau jawa, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau jawa. Sejalan dengan itu, diluncurkan pula Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025. Melalui MP3EI, pendekatan terobosan (*breakthrough*), tidak '*business as usual*', dan kebijakan terpadu (*integrated policy*) dilakukan dalam pengembangan koridor ekonomi wilayah, konektivitas wilayah, dan sumber daya manusia. RPJM ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terdiri dari : RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun

2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RKP merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RSL).



(SUMBER) <https://ekonomi.bisnis.com>

(FOTO) IKN Nusantara dibangun di Kalimantan Timur yang mengusung konsep *smart city* dan *green city*.



#kaltaradihati

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan (Akhlaq) Berkompetensi
Rahmatan (Raya) Cipta (Kaltara)

**#bangga
melayani
bangsa**

**“MAU KEADAAN APAPUN
JANGAN PERNAH BERUBAH,
APALAGI TINGGI HATI DAN SOMBONG,
TETAPLAH SAMA”**

GUBERNUR KALTARA

DR. (H.C.). H. ZAINAL A. PALIWANG, M.HUM.



(SUMBER) Getty Image

RPJPD

Meneropong Kebutuhan dan Proses Pembangunan di Masa Depan

Perencanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang secara terpadu dalam wilayah Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek. Hasil perencanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara berjenjang, dimulai dari perencanaan di level nasional (tingkat pusat) yang kemudian dijadikan pedoman bagi

perencanaan pembangunan di daerah, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Apa itu RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPN Periode 2005 – 2025 akan berakhir di Tahun 2025. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir, Pemerintah Pusat harus menyusun Rancangan Awal RPJPN. Tahun 2024 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas menyusun RPJPN Tahun 2025

-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJPN Tahun 2025 -2045 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD Tahun 2025 - 2045. RPJPD Tahun 2025 - 2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai obyek dan pelaku pembangunan.

Substansi dan Tahapan Penyusunan RPJPD

Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. RPJPD Tahun 2025 - 2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2024. RPJPD memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

Dasar Hukum

UU No. 25 Tahun 2004
tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

- Pasal 5 ayat (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- Pasal 10 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- Pasal 11 ayat (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

UU No. 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah

- Pasal 264 ayat (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- Pasal 265 ayat (1) RPJPD menjadi pedoman dlm perumusan visi, misi, dan program calon KDH.

UU No. 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Perpu UU No. 11
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. (Sehubungan dengan hal tersebut, maka RPJP Daerah perlu ditetapkan sebelum waktu Pilkada Serentak, mengingat RPJP Daerah diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah

Permendagri No. 86/2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD

- Pasal 18 ayat (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir;
- Pasal 18 ayat (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN

**RUU tentang
RPJPN Tahun 2025-2045**

- Pasal 10 ayat (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- Pasal 10 ayat (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah

PEMBANGUNAN DAERAH (UU Nomor 23 Tahun 2014)



publik, analisis pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.

RPJPD Tahun 2025 -2045 disusun melalui beberapa tahapan:

1. Tahapan Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
3. Konsultasi Rancangan Awal

RPJPD;

4. Penyusunan Rancangan RPJPD;
5. Musrenbang RPJPD;
6. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD;
8. Penyampaian Ranperda RPJPD kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda

RPJPD;

10. Evaluasi Ranperda RPJPD;

11. Penetapan Ranperda RPJPD.

RPJPD menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di daerah (APBD).

RPJPD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi tujuan pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. (RSL)

KONSULTASI PUBLIK RANWAL RPJPD 2025–2045 SUKSES DILAKSANAKAN



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Utara 2025-2045 di Aula Gedung Gabungan Dinas, Senin (5/2). Kegiatan yang diselenggarakan secara *hybrid* tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. dan dihadiri oleh berbagai unsur di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, pengusaha, unsur pemuda, perempuan dan anak, serta petani dan nelayan. Forum ini sebagai salah satu upaya pendekatan partisipatif dalam menjangkau aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

“RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat

instrumen arah pembangunan untuk 20 tahun bagi suatu daerah, yang secara strategis akan dijabarkan setiap 5 tahun sekali yang kita kenal dengan RPJMD,” tutur Gubernur.

Gubernur mengatakan RPJPD Provinsi Kaltara disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2024. Secara substansi, RPJPD Kaltara 2025-2045 terdiri atas enam bab yang saat ini telah disusun pada tahap penyusunan rancangan awal sehingga membutuhkan penyempurnaan dari para pihak dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, utamanya dari unsur legislatif, pemerintah Kabupaten/Kota serta mitra kerja pemerintah.

Gubernur lebih lanjut

menjelaskan perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RPJPD akan dijabarkan dalam empat periode RPJMD yaitu periode tahun 2025-2029, periode tahun 2030-2034, periode tahun 2035-2039 dan periode tahun 2040-2045. Dalam rancangan awal, diidentifikasi terdapat lima permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi isu strategis.

“Perlu disadari bahwa, dokumen RPJPD yang akan kita susun memiliki arti penting untuk menjadi pedoman penyusunan RPJMD, menjadi panduan visi misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serta memuat arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), sehingga

dokumen RPJPD disusun tidak hanya memperhatikan isu regional, lokal, dan nasional tetapi juga memperhatikan isu global,” jelas Gubernur.

Terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian untuk membawa Provinsi Kaltara menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Isu perubahan iklim menjadi tantangan serius yang perlu menjadi fokus perencanaan ke depan.

“Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan krisis lingkungan lainnya memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat. RPJPD harus mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam,” tutur Gubernur.

Di samping itu, perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, sehingga perlu menyusun kebijakan mendukung teknologi komunikasi dan informasi di seluruh sektor.

“Bonus demografi yang dihadapi Kaltara menawarkan peluang yang besar, kita perlu fokus peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” terang Gubernur.

Gubernur juga menambahkan akselerasi industri dan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas memajukan sektor ekonomi dalam rangka memaksimalkan nilai tambah



dari hasil bumi Kaltara. Tidak lupa, konektivitas juga menjadi hal krusial dalam pengembangan daerah.

“Perbaiki infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konektivitas antar daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata. Jadi, saya selalu menghimbau

agar setiap kegiatan yang kita kerjakan menggunakan APBD supaya betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta forum Konsultasi Publik agar berpartisipasi aktif dan memberikan masukan untuk merumuskan RPJPD Provinsi Kaltara yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan.(LO)

FASILITASI RANWAL RPJPD 2025–2045 KOTA TARAKAN DAN KABUPATEN TANA TIDUNG



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan (PPDPP) Firmansyah, S.E, mewakili Plt. Kepala Bappeda dan Litbang membuka secara resmi kegiatan Fasilitasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan pada 22 Februari 2024 dan Kabupaten Tana Tidung pada 23 Februari 2024 di Ruang Rapat Gunung Putih Kantor Bappeda dan Litbang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut memedomani Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024. Fasilitasi rancangan awal RPJPD bertujuan untuk menyelaraskan dokumen RPJPD Kabupaten/Kota dengan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen RPJPN 2025-2045. Penyelarasan dokumen perencanaan dua puluh tahun ini akan terus dilakukan oleh Bappeda dan

Litbang bersama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten/Kota sampai disahkan menjadi Perda dalam rangka terwujudnya visi RPJPD Kalimantan Utara 2025–2045, yaitu “Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”.

Berbagai masukan dan saran telah disampaikan guna penyempurnaan penyusunan rancangan RPJPD Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung baik dari sistematika bab, penyelarasan sasaran visi, misi dan arah kebijakan serta

penetapan indikator utama pembangunan dan analisis terhadap *baseline* data yang ditetapkan. Firmansyah menyampaikan dua kunci dalam perumusan RPJPD, yakni selaras dengan RPJPN dengan tetap melihat potensi karakteristik masing-masing daerah.

“Semoga rapat awal ini dapat menjadi sarana perbaikan bagi kita untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dengan mendorong karakteristik lokal yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.” (LO)





RAKORTEKRENBANGNAS 2024

Simpul Penyelarasan Rencana Kerja Pusat-Daerah

Surabaya – Bappeda dan Litbang Kaltara turut serta pada gelaran Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) 2024 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengusung tema ‘Mendorong Transformasi Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045’ Rakortekrenbangnas untuk regional satu wilayah Indonesia bagian timur ini berlangsung dari tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2024 dan diikuti 21 provinsi yang berlangsung di Hotel Vasa, Surabaya. Acara ini turut dihadiri pula OPD teknis di lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Rakortekrenbangnas ini dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri. Dalam arahannya beliau menyampaikan enam arahan yang meliputi aspek perencanaan berintegritas dan efisien, pembangunan berorientasi hasil, kemandirian fiskal melalui peningkatan



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

pendapatan daerah, pemda yang ramah investasi, pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.

Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Tahun 2025 adalah momen penting, dimana tiga dokumen perencanaan pembangunan RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, serta RKP dan RKPD semuanya akan dimulai dan semua dokumen perencanaan tersebut harus diselaraskan pada tahun 2024 ini dari pusat sampai daerah, untuk memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Rakortekrenbangnas ini terbagi menjadi 38 desk, terdiri dari 33 desk urusan, 3 desk kewilayahan dan 2 deks indikator makro. Konsultasi teknis dan pendalaman tematik akan dilakukan pada setiap desk untuk memastikan terwujudnya kesatuan utuh terkait perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Terkait penyusunan RKP dan RKPD, rapat teknis ini harapannya semakin mempertajam dan mendukung tercapainya 8 misi pembangunan yang dijabarkan dalam 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 (AS).

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN GEOPARK BATU BENAU



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Dalam upaya mendukung pengembangan dokumen Rencana Induk Pengembangan *Geopark*, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mencoba merumuskan bentuk lembaga pengelola dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan anggota tim penyusun dokumen usulan *Geopark* Batu Benau yang telah dibentuk Gubernur dan menghadirkan beberapa narasumber berkompeten. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa (20/02) di Ruang Serbaguna Gabungan Dinas, Tanjung Selor.

Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kaltara, Dr. Bustan SE., M.Si. dalam

sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa dari FGD ini diharapkan para pihak terkait dapat memperoleh pemahaman tambahan tentang pengembangan *Geopark*, khususnya aspek kelembagaan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan referensi untuk merumuskan model kelembagaan yang sesuai untuk Kalimantan Utara.

Prof. Dr. Eko Haryono, M.Si (Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada) yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan prinsip kelembagaan pengelola *Geopark* mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor

15 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia tahun 2021-2025.

“Dalam pengembangan *Geopark* diperlukan adanya organisasi yang sifatnya memiliki kewenangan yang independen dalam menyusun program dan memutuskan kegiatannya,” terang Eko.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diterapkan dalam pengembangan *Geopark* adalah dengan lebih mendorong badan pengelola *Geopark* daerah untuk dapat mengambil peran dan fungsi lebih besar sehingga dapat tercapai adanya kemandirian dan otonomi baik dalam hal penentuan kebijakan, pelaksanaan, dan pembiayaannya.

Sementara itu, Ir. R. Hanang Samodra, M.Si (Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN) dalam paparannya menerangkan bahwa peran lembaga pengelola dalam pengelolaan warisan geologi yakni menjaga keberlangsungan aneka proses geologi, mempertahankan bentang *Geopark*, menyusun DED (*Detail Engineering Design*), serta mengembangkan pengelolaan dengan tidak mengurangi atau mengganggu upaya perlindungan dan pelestarian situs warisan geologi.

Hanang juga menambahkan

bahwa dalam menciptakan *geopark* ibaratnya menciptakan negara budaya. Kelembagaannya harus sah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengedepankan prinsip pengembangan “Bumi Lestari, Masyarakat Sejahtera”, “Satu Bumi, Satu Hati”.

Geopark Batu Benau sendiri terbentuk sekitar 1 juta tahun lalu. Terdapat suku pemburu dan peramu terakhir, Punan Batu yang sampai saat ini masih berdiam disana. Pada tahun ini direncanakan akan dilaksanakan agenda *Asia Trans Karst Expedition 2024* di *Geopark* Batu Benau

sebagai langkah promosi dan langkah persiapan penetapan *Geopark*.

FGD yang dimoderatori oleh Gunawan Wibisono dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ini menghadirkan pula sebagai narasumber Dr. Ir. Jatmika Setiawan, MT (Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN), Ir. Budi Martono, M.Si (*General Manajer* Gunung Sewu UNESCO GLOBAL WORK) dan Abdillah Barras, S.T. (Ketua IJEN UNESCO GLOBAL WORK, Banyuwangi). (AS)



(Foto) UGM

BAPPEDA DAN LITBANG GELAR ORIENTASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan orientasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Aula Gedung Gabungan Dinas, Kamis (18/1).

Hadir dalam acara ini kepala Perangkat Daerah dan Fungsional Perencana di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta narasumber Tenaga Ahli Perencanaan dan Kebijakan

Publik, Nita Yiswa, S.T., M.Si. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut mengatakan bahwa kegiatan orientasi penyusunan RKPD tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pedoman kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya tentang proses, tahapan, mekanisme dan teknis penyusunan RKPD. Selain itu, kegiatan orientasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam merencanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025.

Pokok bahasan dalam orientasi penyusunan RKPD tahun 2025 yang disampaikan oleh narasumber Nita Yiswa, yaitu arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 berdasarkan telaahan rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 serta tahapan penyusunan

Renja Perangkat Daerah dan sistematika rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang menghimbau kepala seluruh Perangkat Daerah untuk mampu menerjemahkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan prioritas dalam RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tidak lupa dalam sambutan penutupnya, Bertius, S.Hut juga menegaskan agar memperhatikan ketersediaan data pada dokumen perencanaan.

“Saya harap pada dokumen RKPD tidak ada lagi data yang kosong dan tidak ter-update. Paling tidak, data pada bab II dapat terisi sampai tahun 2022. Mohon dukungan Perangkat Daerah agar terus menyediakan data yang akurat karena data yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan dan pembangunan berkualitas pula,” pungkas Bertius. (LO)



KALTARA TERIMA ALOKASI DANA RBP 2023

Tanjung Selor – Bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara pada hari Jum'at (19/1) Tim Pokja *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) Provinsi Kalimantan Utara mengadakan pertemuan untuk membahas Pengembangan Rencana Kerja Pokja REDD+ dalam rangka implementasi REDD+ Provinsi.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 Tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Result Based Payment* (RBP) REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk kategori pemanfaatan II, *Result Based Payment For Verified Emission Reduction*. Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi dana sebesar USD 2.660.468 berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan pada 22 Desember 2023 lalu ini.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan

Hubungan Antar Lembaga, Burhanuddin, S.Sos., M.Si dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam forum global terkait implementasi REDD+ karena merupakan salah satu negara berkembang terbesar yang masih memiliki hutan alam tropis yang cukup luas sekaligus memiliki potensi ancaman deforestasi yang cukup tinggi.

Beliau juga menambahkan bahwa di dalam REDD+, strategi penting yang relevan untuk digunakan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu menambah area hutan tanaman untuk meningkatkan penyerapan emisi GRK, meningkatkan perlindungan hutan dari kebakaran dan penebangan liar, meningkatkan aliran air di Daerah Aliran Sungai serta area gambut, optimalisasi lahan dan air, serta menerapkan teknologi pertanian dan penyerapan CO2 yang optimal.

“Dalam upaya mengakses pendanaan *Result Based Payment* (RBP) Pokja REDD+ Kaltara harus melakukan penguatan arsitektur

kelembagaan dan penguatan SDM,” terang Burhanuddin.

Sementara itu, Muhammad Fadil dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang menjadi narasumber pada pertemuan ini mengatakan bahwa R B P REDD+ di *Green Climate Fund* (GCF) akan diakses oleh daerah melalui lembaga perantara, sehingga daerah harus menunjuk lembaga yang dapat mengajukan proposal untuk mengakses pendanaan.

“Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) masih membuka peluang untuk lembaga perantara baru yang telah ditunjuk oleh daerah. Sehubungan dengan itu, maka Kaltara wajib mengusulkan lembaga perantara yang akan membantu mengelola dana dan program di Kalimantan Utara,” terang beliau.

Hadir pula dalam kegiatan ini Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara, UPTD KPH, Bappeda dan Litbang dan Dinas Lingkungan Hidup se-Kaltara, akademisi dan mitra pembangunan. (NV)

REMBUK STUNTING DAN PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM PROVINSI KALIMANTAN UTARA



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Malinau - Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 sukses diselenggarakan. Bertempat di Aula Tebengang Kantor Bupati Malinau pada hari Kamis, (7/3), kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder dan unsur Forkopimda Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara.

Acara diawali dengan sambutan oleh Wakil Bupati Malinau Jakaria, SE.,M.Si. Dalam sambutannya, Jakaria menyampaikan program penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Malinau.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP, M.Si. menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Kalimantan Utara sekaligus menyampaikan arahan strategis percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Yansen TP menyampaikan bahwa strategi penanganan kemiskinan dan stunting adalah dengan

fokus berkolaborasi bersama semua unsur pemerintah dan non pemerintah dengan berfokus pada pendampingan keluarga berisiko stunting. Hal ini dilakukan dengan jalan meningkatkan koordinasi hingga tingkat desa, peningkatan intensitas pendampingan keluarga berisiko stunting, dan pencatatan pelaporan dan evaluasi berkelanjutan.

Yansen TP juga menyampaikan bahwa angka stunting Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 22,1 persen, yang masih diatas angka nasional yakni 21,6 persen. Pada tahun 2024, ditargetkan angka stunting Provinsi Kalimantan Utara dapat turun ke angka 14 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 6,45 persen, yang masih berada dibawah rata rata nasional sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Utara pada

tahun 2023 juga turun pada angka 0,34% dari angka 0,63% pada tahun 2022.

Rembuk Stunting Rumuskan Strategi Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkrit dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama yang memuat 9 poin komitmen seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Isi dari komitmen bersama tersebut diantaranya; memperkuat kolaborasi tugas dan tanggung jawab tim percepatan penurunan stunting dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa ; penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sehat bagi keluarga berisiko stunting ; peningkatan alokasi anggaran intervensi spesifik dan sensitif.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Dr. Drs. Wahidin, M.Kes selaku Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat yang berkesempatan menyampaikan paparan tentang Aksi Konvergensi Layanan Percepatan Penurunan Stunting pada Level Keluarga dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dana DAK BOKB dari BKKBN untuk 5 Kabupaten/Kota.



Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga turut hadir dalam kegiatan tersebut secara daring, dengan penyampaian paparan materi “Merajut Generasi Emas di Daerah 3T Kaltara Beranda Terdepan NKRI” oleh Ibu Renova Gloria Montesori Siahaan, SE. MSc. Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas.

Acara dilanjutkan dengan sesi

diskusi kelompok, dimana peserta dibagi menjadi tiga kelompok dengan tema diskusi yakni; Tema 1 : Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di daerah, ; Tema 2 Intervensi Sensitif dan spesifik dalam Percepatan Penurunan Stunting,; Tema 3 : Integrasi Pendataan, perencanaan dan penganggaran. Kemudian hasil dari diskusi kelompok tersebut

dipaparkan dan disusun sebagai bagian dari berita acara rembuk stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.(RO)



SEKDA BUKA BIMTEK MASTER OF TRAINERS (MOT) PEMANFAATAN DATA REGSOSEK



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tarakan, Kalimantan Utara - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H.Suriansyah, M.AP membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Master of Training* (MoT) di Hotel Tarakan Plaza, Senin (11/3). Bimtek ini diikuti oleh 25 peserta dari berbagai instansi di Kaltara dan berlangsung selama 5 hari.

Sekretaris Daerah dalam sambutannya mengatakan bahwa Bimtek MoT ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para trainer di Kaltara. “Diharapkan dengan mengikuti Bimtek ini, para trainer dapat menjadi fasilitator yang handal dalam mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan,” ujarnya. Lebih lanjut, Suriansyah menjelaskan bahwa salah satu fokus utama Bimtek MoT ini adalah untuk memperkenalkan aplikasi SEPAKAT dan data Regsosek.

“Aplikasi SEPAKAT merupakan aplikasi yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran daerah, sedangkan data Regsosek merupakan data terpadu yang memuat profil, kondisi sosial,

ekonomi, dan kesejahteraan penduduk,” terangnya. Suriansyah berharap dengan Bimtek MoT ini, para trainer dapat memahami dan menggunakan aplikasi Sepakat dan data Regsosek dengan baik. Sehingga, mereka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

Agenda pelatihan pemanfaatan data Regsosek dipersiapkan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pendamping. Pelatihan pemanfaatan data Regsosek akan memanfaatkan SEPAKAT. Pemanfaatan SEPAKAT sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. SEPAKAT merupakan aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat, di level Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/

Kelurahan dengan menyediakan berbagai analisis, rekomendasi program intervensi dan layanan.

SEPAKAT menggunakan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) untuk proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, fakta dan analisa merupakan fondasi dalam penggunaan dan pemanfaatan SEPAKAT untuk perumusan berbagai kebijakan penanggulangan di daerah.

Pemanfaatan SEPAKAT sebagai alat untuk memanfaatkan data Regsosek tidak hanya dilakukan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga hingga tingkat Desa/Kelurahan. Kurikulum pembelajaran telah disusun untuk mengakomodir pemanfaatan data Regsosek di berbagai tingkat pemerintahan.

Kegiatan pelatihan meliputi materi yang berkaitan dengan pembangunan inklusif, data literasi, analisis, perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi, pelayanan, pemanfaatan dan tata kelola, permohonan hak akses, serta, perlindungan data pribadi. (RO)

(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

PENGISIAN DATA SAFEGUARD REDD+ PERLU KETERPADUAN SEMUA PIHAK



Tarakan - Guna mendukung percepatan implementasi REDD+ di Kalimantan Utara, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi Pokja REDD+ dalam Pengumpulan Data dan Bimbingan Teknis Pengisian Data *Safeguard* REDD+ serta Identifikasi Penyusunan Rencana Aksi Provinsi untuk Implementasi REDD+. Kegiatan ini dilaksanakan di Tarakan pada 28 s.d 29 Februari 2024 dengan peserta adalah tim *Safeguard* dan tim Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Utara.

Dalam sambutan saat membuka acara secara online, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bertius S.Hut berharap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat membimbing Provinsi Kaltara untuk mendukung REDD+ sesuai regulasi yang berlaku.

“Kaltara sangat membutuhkan pendampingan serta dukungan berkaitan dengan cara mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tersedia,

potensi di Kaltara yang perlu dipertahankan dan perlu berlanjut untuk mencapai output kegiatan yang diharapkan,” buka Bertius.

Sementara itu, Franky Zamzani, S.Hut., M.Env selaku Kasubdit Pemantauan dan Pelaksanaan Mitigasi dalam paparannya menyampaikan berdasarkan surat Keputusan Menteri LHK nomor SK.1398/MenLHK/Setjen/Kum.1/2023, tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Result Based Payment* (RBP) REDD+ *for Result Period* 2014 – 2016 *Green Climate Fund Output* 2, telah ditetapkan alokasi dana RBP tersebut untuk 34 Provinsi di Indonesia. Sebagai tindaklanjutnya, provinsi harus melakukan pengisian data *safeguard* REDD+ pada Sistem Informasi *Safeguards* (SIS REDD+) dan *Summary Safeguards* REDD+ Provinsi.

Diketahui bahwa ruang lingkup kegiatan penggunaan dana RBP REDD+ GCF Output 2 meliputi Kesatuan Pengelola Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kampung Iklim, Pengelolaan

Hutan Lestari, Konservasi dan Biodiversity, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Arsitektur REDD+.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc, yang menjadi salah satu narasumber dalam paparannya menyebutkan peluang pendanaan dan dukungan sumber daya lainnya harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan di Kaltara. Oleh karena itu diperlukan sebuah panduan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan aksi yang lebih konkrit di tingkat tapak.

Dalam pengisian data *safeguard* perumusan rencana aksi Provinsi Kaltara di fasilitasi oleh tenaga ahli Sarah Agustiorini, Msi dan Solichin Manuri, Ph.D. Hadir pula dalam acara ini perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara, tim *safeguard* dan tim rencana aksi REDD+ dan pelaporan, serta mitra pembangunan lainnya. (NV)

PEMBENTUKAN BRIDA/BAPPERIDA UNTUK KEMBANGKAN RISET DAN INOVASI DAERAH



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Percepatan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) / Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengembangan riset serta inovasi pada beragam sumber daya di daerah. Hingga kini tercatat baru 16 Provinsi yang sudah membentuk BRIDA sedangkan sisanya masih dalam proses pembentukan. Kecenderungannya adalah memasukkan BRIDA ke dalam Bappeda sehingga memberi nama baru badan itu menjadi BAPPERIDA.

Hal ini diketahui saat audiensi

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan jajaran Direktorat Fasilitas & Pemantauan Riset & Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada hari Senin (4/3). Rombongan disambut Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mochammad Sarkawi.

Saat audiensi, Direktur Fasilitas & Pemantauan Riset & Inovasi Daerah, Lukman Shalahuddin menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan yang dilakukan. Hal tersebut, terkait pendampingan pembentukan

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Utara dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

“Kita terus mendorong daerah-daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera melakukan pembentukan BRIDA. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional dan diundangkan tanggal 24 Agustus 2021. Serta Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah,” jelas Lukman Shalahuddin.

BRIN telah menargetkan



pembentukan sebanyak 14 dari 38 provinsi dan sebanyak 50 dari 514 BRIDA di kabupaten dan kota di Indonesia akhir tahun 2023. Data terakhir pada Februari 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar 16 dari 38 provinsi serta 86 dari 514 BRIDA di kabupaten dan kota di Indonesia. Adapun provinsi yang telah membentuk BRIDA antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut, menyampaikan bahwa progres terkini pembentukan BRIDA/BAPPERIDA di Provinsi Kalimantan Utara, saat ini telah terbit surat rekomendasi dari BRIN serta sedang berproses menunggu Surat Persetujuan dari Kemendagri.

BRIDA Provinsi Kalimantan Utara akan tergabung ke dalam Bappeda sehingga berubah nomenklatur menjadi

BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah).

“Kami menyadari, perencanaan pembangunan daerah tentunya juga diawali dari kajian, penelitian, data yang kuat dan inovasi agar lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah. Mudah-mudahan

pembentukan BAPPERIDA di Kaltara segera terwujud,” ucap Bertius.

Selanjutnya, Tim Direktorat Fasilitas & Pemantauan Riset & Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional didampingi Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara melakukan pendampingan ke Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung serta Kabupaten Nunukan.

Di Kabupaten Nunukan, rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, S.IP, M.Si. Dalam diskusi tersebut, Kabupaten Nunukan akan segera menindaklanjuti dengan pembuatan proposal pembentukan BRIDA/BAPPERIDA. Demikian pula dengan Kabupaten/Kota lainnya, akan menindaklanjuti dengan pembuatan proposal pembentukan BRIDA/BAPPERIDA untuk selanjutnya disampaikan ke BRIN, agar segera dibuatkan Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA.(AS)



WUJUDKAN PROGRAM KERJA BERKUALITAS DAN KOMPRHENSIF MELALUI RAKOR



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tarakan – Bertempat di Ballroom Swissbel hotel, Tarakan dilangsungkan kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Sumber Dana APBN Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 4 - 5 Maret 2024 ini dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Sapi'i, ST.,M.AP yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara.

Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dari perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan program kerja yang komprehensif, berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan dan outputnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Utara.

Rapat Koordinasi ini juga menjadi wadah untuk saling menyampaikan masukan maupun kendala-kendala terhadap program kerja yang dilaksanakan, baik dari Kabupaten/Kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kepada seluruh pihak yang hadir agar dapat ditindaklanjuti.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemaparan masing-masing Balai/Satker/Unit Kerja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ATR/BPN terkait gambaran umum program dan kegiatan, realisasi kegiatan Tahun 2023, progres pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya masing-masing perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan perwakilan Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota memberikan tanggapan serta masukan terhadap paparan yang disampaikan oleh masing-



(FOTO) TIM PUBLIKASI BAPPEDA & LITBANG

masing Balai/Satker/Unit Kerja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ATR/BPN dalam bentuk diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Bertindak sebagai moderator adalah 3 (tiga) orang Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kaltara.

Instansi Pemapar dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini diantaranya adalah :

- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara.
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan V.
- Satuan Kerja Penyediaan

Perumahan Kalimantan II.

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Kalimantan Timur.
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu.
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk. (RSL)

Hadir dalam kegiatan ini Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, Instansi Vertikal yang memiliki kegiatan di Kalimantan Utara dan Bappeda dan Litbang se-Kalimantan Utara. (RSL)

PERENCANAAN YANG BAIK DIHARAPKAN AKAN MENGHASILKAN PROGRAM KERJA YANG KOMPREHENSIF, BERKUALITAS, BERKELANJUTAN, BERKEADILAN DAN OUTPUTNYA DAPAT DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA.



KUNJUNGI KALTARA, BSKDN KENALKAN INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor – Banyaknya instrumen yang mengukur kinerja Pemerintah Daerah namun masih dilihat secara parsial dan dianalisis secara terpisah. Ada urgensi untuk mengembangkan indeks yang menggambarkan tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif dengan mengkolaborasi dan memanfaatkan berbagai pengukuran kinerja yang telah dilakukan di berbagai sektor.

Hal ini terungkap saat diadakan Diskusi Kelompok Terpumpun antara Bappeda dan Litbang, Biro Pemerintahan Setdaprov. dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam rangka penyempurnaan instrument Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) pada hari Rabu

(21/3) bertempat di Ruang Rapat Gn. Putih, Bappeda dan Litbang.

Agung Wijaya, Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN menjelaskan bahwa ITKPD merupakan indeks yang secara komprehensif mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan keterkaitan antara sistem pendukung, kapasitas pemerintahan dan capaian pembangunan daerah.

“ITKPD dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk bahan evaluasi, pedoman intervensi, arahan dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” jelas Agung.

Indikator pada rancang bangun

ITKPD bersumber dari data sekunder yang berupa indeks/bagian dari indeks/data satuan yang sudah tersedia di Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan institusi lainnya yang memiliki kesesuaian dengan kerangka ITKPD. (AS)



(INSERT) AGUNG WIJAYA, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA BSKDN



#kaltaradihati

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**“Jangan pernah melewati sedetikpun
waktumu dengan perbuatan sia-sia”**

WAKIL GUBERNUR KALTARA
Dr. Yansen TP, M.Si

TINGKATKAN KAPASITAS PENYELENGGARA SDI, PEMPROV KALTARA GELAR PENGUATAN FORUM SDI



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tarakan – Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si membuka secara resmi kegiatan Penguatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Kalimantan Utara, di ruang pertemuan Swiss-belhotel, Senin (25/3).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.701/2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 tersebut dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara.

Turut hadir Kabid. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Yeni Indah Susanti, S.T., M.M, Chief Data and Governance Officer Sekretariat SDI tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, Ph.D, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Lendra Sofyan, ST, M.Si secara daring melalui *zoom meeting*.

Burhanuddin dalam sambutannya mengapresiasi terlaksananya kegiatan penguatan Forum SDI dan menyambut baik narasumber dan peserta yang hadir.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperkuat keterpaduan proses penyelenggaraan SDI di Provinsi Kalimantan Utara,” tutur Burhanuddin.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk Forum SDI Kaltara yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur nomor 188.44/K.115/2023. Burhanuddin menyatakan bahwa Forum SDI tingkat daerah dilaksanakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi mengenai pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi, serta merumuskan bahan harmonisasi kebijakan

pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan SDI di tingkat daerah.

Lebih lanjut, momentum penyusunan Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mewajibkan Pemprov Kaltara mampu menyajikan data-data pembangunan yang mutakhir, valid dan dapat menggambarkan capaian isu strategis pembangunan Provinsi Kaltara. Oleh karena itu, keberadaan Satu Data Indonesia sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data.

“Diharapkan para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dapat mengambil langkah



selanjutnya untuk percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah dalam rangka mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan,” tegas Burhanuddin. (LO)



WORKSHOP PENYUSUNAN CASCADING DAN POHON KINERJA



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Kaltara melaksanakan kegiatan *Workshop Penyusunan Cascading dan Pohon Kinerja Sakip* pada hari Selasa dan Rabu (26-27/4) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Suriansyah, M.AP dan Narasumber dari SMART ID, Restu Mulya Pramata, Mochammad Ubaidillah, dan Muhammad Ariz Pratama.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah, M.AP dalam

sambutanannya sekaligus membuka acara menyampaikan harapan agar kegiatan *Workshop* ini menjadi wadah yang bisa dijadikan tempat untuk memperdalam proses dan tata cara penyusunan *cascading* dan pohon kinerja Sakip yang baik sehingga kedepannya *cascading* dan pohon kinerja di setiap OPD yang ada dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Awal tahun 2024 ini adalah waktu yang sangat penting dalam proses penyusunan *cascading* dan pohon kinerja yang diharapkan dapat menjadikan proses kinerja perangkat daerah terkait dapat

berjalan dengan baik setahun kedepan dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini hal-hal yang menjadi kendala selama proses penyusunan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan dan arahan dari narasumber yang telah hadir pada hari ini," buka Suriansyah.

"Untuk mensukseskan kegiatan ini dan harapan-harapan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat



dalam proses penyusunan *cascading* dan pohon kinerja ini, yang diharapkan dengan keterlibatan semua pihak dapat menjadi usaha kita bersama guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam gerakan “Kaltara Rumah Kita”, sambung Suriansyah.

Perlu diketahui bersama bahwa penyusunan *cascading* dan pohon kinerja ini sangat penting dimana sesuai fungsinya yaitu proses penjabaran dan penyelarasan

Sasaran Strategis, IKU, dan/ atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*), dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Hal tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa pohon kinerja memuat semua unsur penting dalam proses pemerintahan yaitu sasaran strategis, IKU dan tugas maupun tanggung jawab dari setiap jabatan. Hal ini juga menjadi alasan kuat bahwa

penyusunan *Cascading* dan pohon kinerja harus dilaksanakan sebaik mungkin dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak terjadi kendala yang dapat menghambat jalannya proses pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. (SR).



SIDANG PLENO KE – I TAHUN 2024 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP

(FOTO) BAPPEDA & LITBANG



Tarakan - Bertempat di Hotel Harmonis, Kota Tarakan pada 28 Maret 2024, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap (TKPSDA WS Sesayap) mengadakan Sidang Pleno ke – I Tahun 2024 dan dilaksanakan secara *hybrid*. Agenda sidang membahas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (P-SIH3).

WS Sesayap merupakan WS Lintas Negara yang merupakan WS Strategis Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ada sekitar 19 Daerah Aliran Sungai (DAS) di WS ini. Diantaranya adalah DAS Sesayap, DAS Sebuku, DAS Bunyu, DAS Linungkayan, DAS Nunukan, DAS Sebatik, DAS Sekatak, DAS Simanggaris, dan DAS Tarakan.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sendiri

merupakan tim pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai. TKPSDA sendiri dibentuk didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sedangkan pedoman pembentukannya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai. TKPSDA WS Sesayap ini memiliki tugas untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi dalam pengelolaan SDA sebagaimana amanat UU SDA dan PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam Sidang Pleno ke – I Tahun terdapat beberapa hal

yang menjadi pembahasan diantaranya :

1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran).
2. Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antar lembaga pengelola.
3. Menetapkan koordinator pengelolaan SIH3 pada tingkat wilayah sungai.

Hadir dalam kegiatan ini diantaranya perwakilan dari Dinas PUPR-Perkim, Yayasan Pionir, BWS Kalimantan V dan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. (RSL)



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

FKP2RK BERSAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SELARASKAN RPJPD 2025 – 2045 DAN RPJMN 2025 – 2045

Jakarta – Mengawali tahun 2024, Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKP2RK) mengadakan Rapat Koordinasi Penyelarasan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 lingkup Regional Kalimantan dengan RPJPN tahun 2025-2045. Acara dilaksanakan pada hari Jum'at (23/2) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta. Forum ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, ST dan dihadiri Bappeda dan Litbang se-Kalimantan serta tim penyelaras RPJPD Kementerian PPN/Bappenas.

Agenda kegiatan diantaranya penyampaian progres penyusunan dokumen RPJPD

2025-2045, penyampaian kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi dalam proses penyelarasan RPJPD Kabupaten/ Kota. Hadir mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mochammad Sarkawi, S.Hut, M.Eng. Beliau menyampaikan progres penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 dengan rumusan Visi Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, Berkelanjutan, serta RPJPD Kaltara yang sudah melalui tahap konsultasi publik dan konsultasi Kemendagri RI, serta saat ini masih dalam tahap perbaikan pasca proses konsultasi.

Diketahui bahwa dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045, bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi sedangkan bagi RPJPD Kabupaten/ Kota bersifat imperatif *flexibel*. Dalam penyusunan *baseline* data dapat memperhatikan realisasi/ capaian daerah, tetapi target dapat mengikuti target yang di sediakan oleh Bappenas. Selanjutnya akan diagendakan kembali pertemuan FKP2RK dengan agenda rumusan dalam penetapan target-target pada indikator dan cascading perencanaan kinerja. (AS)



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

BAPPEDA DAN LITBANG KEBUT FINALISASI VOLUNTARY LOCAL REVIEW (VLR)

Tarakan – Sekretariat SDGs Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini telah mencapai tahap Finalisasi Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, setelah sebelumnya pada Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan penyusunan Executive Summary (VLR) dengan Tema “Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Utara”.

Kegiatan Finalisasi Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) SDGs Provinsi Kalimantan Utara ini berlangsung di Tarakan pada 18 s.d 19 Maret 2024 dan dihadiri oleh tim penyusun VLR diantaranya dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan SDGs Center Universitas Kaltara dan Universitas Borneo Tarakan. Adapun hasil dari finalisasi

penyusunan VLR ini akan disampaikan dengan waktu yang telah dijadwalkan untuk dapat dipublikasikan secara internasional.

Diketahui sebelumnya bahwa Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Germany International Development Cooperation (GIZ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) sedang melaksanakan kerjasama dalam proyek Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan dalam Proyek Global South (SDGs SSTC) untuk periode 2020 – 2023.

Proyek kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan Sustainable

Development Goals (SDGs) di tingkat nasional melalui Sekretariat SDGs Nasional dan di tingkat daerah dengan 4 provinsi percontohan serta mendorong kontribusi Non-State Actors (NSAs)/ aktor pembangunan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.

Keempat provinsi percontohan tersebut adalah Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Utara (Kaltara), Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelembagaan Sekretariat SDGs Provinsi memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs pada seluruh siklusnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

VLR SDGs adalah proses dimana pemerintah daerah, seperti



Provinsi, Kabupaten dan Kota secara sukarela menyusun dan melaporkan kemajuan dalam mencapai SDGs ke level lokal dan internasional.

VLR SDGs adalah cara unik untuk menceritakan kisah daerah dalam kesuksesan pencapaian tujuan SDGs tertentu sekaligus menjadi media promosi keunggulan dan potensi daerah di panggung global dan merupakan alat untuk mendorong daerah untuk bertindak secara lokal dan berpikir secara global.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Winastawan Gora (Expert SDGs Tata Kelola Data, Monitoring Evaluasi GIZ), Lingga Suyud (Expert SDGs Bidang Aktor, Kelembagaan, dan Kemitraan Multipihak GIZ), Nasokah (Expert SDGs Bidang Manajemen Pengetahuan GIZ) dan Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA (Advisor SDGs). (AS)





SEKILAS



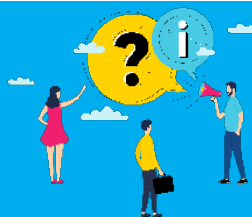
1.

1. Bappeda dan Litbang Kaltara melaksanakan Konsultasi dan Penyelarasan Rancangan Awal RPJPD Kaltara tahun 2025 - 2045 di Kementerian Dalam Negeri (7/2).
2. Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut menerima kunjungan Kepala BPS Kaltara guna membahas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor dan hasil Sensus Pertanian (10/1).



2.

S INFO



3.



3. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ruslim, ST,MT menjadi salah satu narasumber pada Rakorda Penanggulangan Bencana se-Kaltara (7/2)..
4. Perencana Ahli Muda, Yatno Supriadi, SE saat menjadi pembicara pada kunjungan kerja Sabah Economy Development and Investment Authority (SEDIA) di Nunukan (30/1).

4.



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

SISTEM MANAJEMEN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAMUDRA DKP)

FAJAR DWI MAULANA EFTIAH

Juara I Kategori Tata Kelola Pemerintahan Lomba Inovasi Daerah

Tingkat keberagaman data bagi suatu instansi pemerintah tergolong tinggi. Dimana setiap satuan unit kerja bahkan perorangan memproduksi data yang beraneka ragam. Termasuk yang dirasakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Tingkat kedalaman data yang dihasilkan juga berbeda. Sebagai contoh data produksi perikanan, dimana data tersebut dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, misalnya produksi perikanan tangkap di laut, data yang dihasilkan dapat dianalisa sampai jumlah produksi per jenis ikan tertentu yang dihasilkan menggunakan alat tangkap apa.

Karena kompleksitas data yang tinggi, seringkali pengolahan dan analisa data dilakukan secara berulang. Tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan data yang disebabkan karena *human error*. Selain itu, pengolahan data yang dilakukan secara berulang tentu dirasakan tidak efisien serta membuang waktu.

Hal tersebut bisa terjadi salah satunya karena seringkali permintaan data yang berulang dari pengguna data. Pengguna data meliputi pengguna data internal dan eksternal. Pengguna

data internal seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Analis, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, atau pegawai didalam perangkat daerah. Pengguna data eksternal seperti Bappeda dan Litbang, DKISP, dan instansi atau *stakeholder* lainnya.

Seringkali pengguna data membutuhkan data secara cepat dan instan, namun membutuhkan komunikasi tertentu dengan produsen data. Hal ini mengindikasikan penggunaan data dan informasi belum optimal.

Dari uraian diatas ada tiga masalah utama dalam pengelolaan data, yaitu :

1. Kompleksitas Data

- Setiap satuan unit kerja bahkan perorangan menghasilkan data.
- Tingkat keberagaman data yang tinggi.
- Tingkat kedalaman data berbeda-beda

2. Pengolahan data Berulang

- Arsip data yang kurang tertata.
- *Human error* meningkat.

- Tidak efektif dan efisien.

3. Pemanfaatan data tidak optimal

- Permintaan data berulang.
- Pengguna data membutuhkan data secara cepat dan instan.

Berdasarkan beberapa hal diatas, perlu ada platform yang membantu pengguna data untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat.

Inovasi Samudra DKP bertujuan untuk memudahkan pengguna data memperoleh informasi secara cepat dan instan, mengurangi kesalahan dalam pengolahan dan analisa data berulang dan menyatukan berbagai macam data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai informasi utuh.

Keluaran langsung dari kegiatan inovasi ini yaitu platform berupa website sebagai media komunikasi data dan informasi. Untuk menjaga keamanan data, maka ada halaman login sebagai pengatur otorisasi pengguna.

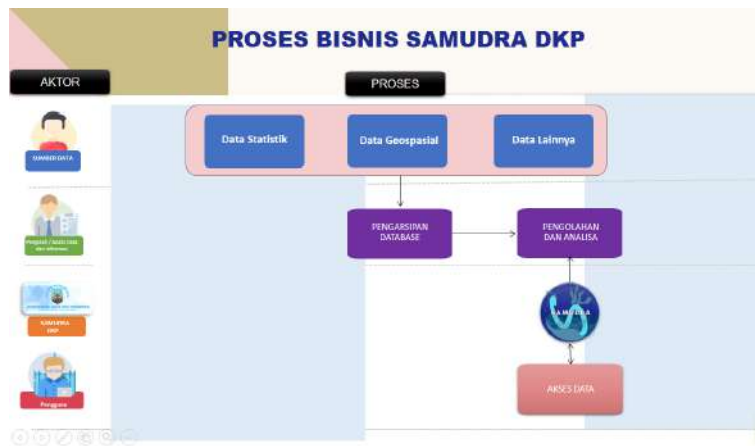
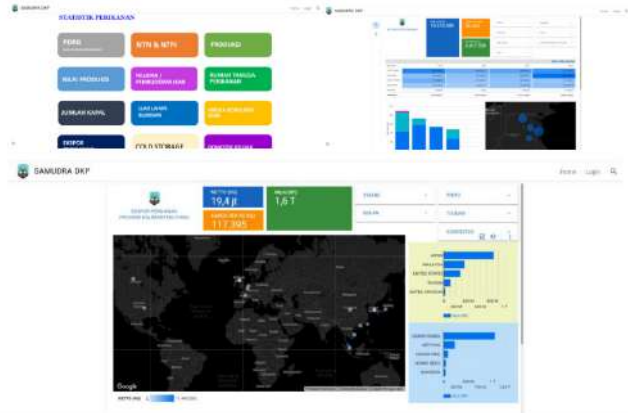
Sebagai contoh untuk pengguna data yang diakses oleh atasan langsung, maka menu menampilkan data akan aktif semua, namun untuk pengguna

data dari bidang terbatas pada kewenangan dan keperluannya.

Produk SAMUDRA DKP berupa platform penyajian data yang menggambarkan informasi secara deskriptif. Data-data yang dikelola merupakan data-data yang dihasilkan oleh individu/ perorangan/ kelompok yang menjadi kewenangannya dengan mekanismenya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data-data tersebut dikumpulkan kepada pengolah data atau analis data dan informasi di instansinya yang kemudian dikelola kedalam penyimpanan database.

Pengumpulan data disesuaikan dengan ketersediaan data di masing-masing produsen data dalam instansi. Data yang berada dalam database dilakukan analisis untuk menggambarkan data sesuai dengan kebutuhan. Hasil Analisa data akan ditampilkan dalam platform SAMUDRA DKP. (Redaksi)





POSTER (POSYANDU PINTER)

Inovasi Pelayanan Posyandu Berbasis Website untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak sebagai Upaya Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kalimantan Utara

Melati Puteri Sulistiani

Juara II Kategori Ide/Inisiatif Lomba Inovasi

Kalimantan Utara berhasil mendapatkan penghargaan karena masuk ke dalam 3 (tiga) provinsi dengan penurunan angka stunting terbesar di Indonesia. Keberhasilan Kalimantan Utara menekan angka prevalensi stunting sebesar 5,4 persen yakni dari 27,5 persen menjadi 22,1 persen, hal ini menunjukkan kinerja yang baik bagi seluruh unsur pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Utara.

Walaupun demikian angka ini masih berada di atas angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,6 persen sehingga masih perlu keseriusan seluruh pemda di Kalimantan Utara untuk mencapai target nasional. Selain itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah Kabupaten Tana Tidung yang justru mengalami kenaikan angka stunting sebanyak 7,9 persen yakni dari 22,8 persen pada tahun 2021 menjadi 30,7 persen pada tahun 2022 dan Kabupaten Nunukan yang angka prevalensi stuntingnya di angka 30,5 persen. Maka dari itu sebagai wujud keseriusan Kaltara, beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait penurunan stunting oleh setiap Kepala Daerah se-Kalimantan Utara.

Hal ini guna menurunkan prevalensi stunting hingga 14

persen di tahun 2024 dan 0 persen di tahun 2030 sesuai target *Sustainable Development Goals* (SDGS). Salah satu faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi adalah kualitas pelayanan posyandu yang masih belum optimal. Masih banyak kader posyandu yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan penilaian status gizi anak dan ibu hamil. Selain itu peran ayah yang dirasa belum maksimal, dapat dilihat dari fenomena ibu hamil dan ibu yang mengantar anaknya ke posyandu tidak didampingi suami mereka. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, diperlukan penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak, mengingat masih banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut merupakan tanggungjawab ibu saja tanpa adanya pelibatan peran ayah.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di Kalimantan Utara. Inovasi ini diharapkan dapat membantu para kader posyandu baik di kota maupun kabupaten se Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal, sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Kalimantan Utara.

Tujuan dari inovasi Poster (Posyandu Pinter) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di Kalimantan Utara. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menurunkan Angka prevalensi stunting di Kalimantan Utara, meningkatkan kualitas pelayanan posyandu, menumbuhkan dukungan dan peran aktif seorang ayah untuk lebih memberdayakan diri dalam berbagi tanggungjawab dengan istrinya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak.

Sedangkan sasaran dari inovasi Poster adalah Kader posyandu dan masyarakat. Dengan website ini dapat membantu kader posyandu untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dan bagi masyarakat Website ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kesehatan ibu dan anak. Inovasi Posyandu Pinter dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap 1: Pengembangan Website.

Website ini dikembangkan oleh tim IT yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional di bidang teknologi informasi.

Website ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan, seperti:

- **Penilaian status gizi anak.** Kader posyandu dapat dengan mudah menilai

status gizi anak dengan memasukkan nama atau NIK anak. Jika status gizi anak atau ibu hamil kurang baik, maka akan muncul tanda peringatan dan instruksi/arahan yang dapat disampaikan kader posyandu kepada orangtua dan ibu hamil.



Tahap 2 : Pelatihan dan Pendampingan.

Tahap kedua adalah pelatihan dan pendampingan bagi kader posyandu dalam menggunakan website Poster. Pelatihan ini dilakukan oleh tim IT dan tenaga kesehatan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali kader posyandu dengan keterampilan dalam menggunakan website Poster dan menambah wawasan kader posyandu tentang kesehatan ibu dan anak.

Tahap 3: Sosialisasi dan Edukasi.

Tahap ketiga adalah sosialisasi dan edukasi tentang website Poster kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat website Poster.

Tahap 4: Evaluasi.

Tahap keempat adalah evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi Poster. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan inovasi dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Inovasi Poster merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu dan kesehatan ibu dan anak sehingga

dapat membantu dalam proses percepatan penurunan stunting di Kalimantan Utara. Inovasi ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien.

Inovasi Poster memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kalimantan Utara, antara lain:

- Peningkatan kualitas pelayanan posyandu.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Peningkatan dukungan dan peran aktif ayah sehingga ayah sadar akan pentingnya pendampingan dan pemenuhan kebutuhan istri dan anak.
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak

Inovasi Poster membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Inovasi Poster diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara secara jangka panjang. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan inovasi ini adalah membangun komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat inovasi, melakukan pengembangan dan penyempurnaan fitur-fitur pada website Poster, dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak. (Redaksi).

- **Resep Pemberian Makanan Tambahan (PMT) posyandu.** Website ini menyediakan resep Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita yang berbahan pangan lokal sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023.
- **Edukasi kesehatan.** Website ini menyediakan materi edukasi seperti tentang ASI dan menyusui, vaksinasi, dan kesehatan ibu dan anak lainnya.
- **Ayah Sigab (Siaga Bertanggungjawab).** Website ini menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang bersifat preventif, promotif untuk membantu keluarga dalam mengasuh, mendidik, dan membangun karakter anak yang diharapkan dapat menjembatani penguatan pengasuhan dengan penguatan peran ayah. Hal ini merupakan salah satu upaya memberdayakan sosok ayah di dalam berbagi tanggungjawab dengan istrinya.
- **Informasi posyandu.** Website ini menyediakan informasi tentang lokasi, jadwal, dan petugas posyandu.



GINGERCOOKIES (COOKIES BERBAHAN DASAR JAHE DAYAK)

Ririn Ariyanti

Juara III pada Kategori UMKM
Unggulan Kaltara Lomba Inovasi
Daerah 2023

Perubahan yang terjadi pada ibu hamil dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Salah satu ketidaknyamanan selama hamil yaitu mual muntah. Gejala ini dimulai sekitar minggu pertama dan menurun drastis di akhir minggu trimester pertama.

Berdasarkan hasil penelitian 50-90% wanita hamil mengalami mual muntah pada trimester pertama dan sekitar 25% wanita hamil mengalami masalah mual muntah harus beristirahat dari pekerjaannya. Setiap wanita hamil memiliki derajat mual muntah yang berbeda-beda, ada yang tidak terlalu merasakan apa-apa, tetapi ada juga yang merasa mual muntah yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Penanganan yang diberikan tenaga kesehatan untuk mual muntah yang dialami ibu hamil saat ini sangat beragam, mulai dari tindakan konseling, pengobatan farmakologi dan non farmakologi. Salah satu tindakan non farmakologi yang dianjurkan yaitu dengan mengkonsumsi olahan jahe

seperti, kue, minuman, permen, dan aromaterapi. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan olahan jahe berkhasiat menurunkan mual muntah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, masyarakat suku Dayak mempercayai mengkonsumsi jahe dayak pada perempuan hamil dapat mengatasi mual pusing serta dapat memperlancar pada saat proses melahirkan, suku Dayak mengonsumsi jahe biasanya di minum dengan cara penyiapan ramuan jahe yang di tambah dengan kencur, gula merah yang di jadikan jamu dan di minum pada wanita hamil karna ekstrak nya yang di percayai berkhasiat.

Permasalahan prioritas pada kegiatan ini adalah permasalahan kesehatan dan masalah ekonomi, masalah kesehatan adalah bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil dengan pendekatan kearifan lokal, sedangkan masalah ekonomi adalah bagaimana meningkatkan potensi pendapatan mitra pembuat cookies dengan inovasi produk lezat dan bermanfaat

bagi kesehatan serta produk yang dihasilkan dapat dipasarkan.

Kelompok pembuat cookies yang menjadi mitra adalah pembuat cookies rumahan, dimana produksinya dilakukan di rumah dengan dibantu beberapa pekerja, produknya di pasarkan melalui jejaring media sosial juga di titipkan ke swalayan. Produksi mitra meningkat tajam pada perayaan hari besar keagamaan namun pada hari biasa, mitra hanya memproduksi cookies secara terbatas dalam jumlah kecil, sehingga dengan inovasi tersebut pembuat cookies dapat terus memproduksi cookies sepanjang tahun dan bermanfaat untuk kesehatan.

Tujuan dan sasaran inovasi ini adalah untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan dasar pembuatan cookies, menciptakan produk inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai alternatif solusi untuk mengurangi keluhan mual dan muntah pada kehamilan serta inovasi produk untuk meningkatkan nilai jual dengan sasaran inovasi yaitu ibu hamil dan masyarakat umum.



TAHAP OLAHAN GINGERCOOKIES



Aspek kebaharuan dalam inovasi ini, dimana jahe tersebut di olah menjadi produk yang lebih fleksibel dan praktis di konsumsi oleh ibu hamil untuk mengurangi mual dan muntah. Sebanyak 60% ibu hamil, menggunakan jahe sebagai solusi untuk mengurangi mual dan muntah dan 40% menginginkan olahan jahe dapat berupa makanan agar lebih praktis ketika di konsumsi. Sehingga dilakukannya inovasi pembuatan ginger cookies dengan cara mengolah jahe menjadi serbuk jahe dan selanjutnya di olah menjadi ginger cookies.

Ginger cookies untuk 6 porsi dengan nilai gizi per porsi yaitu energi 226 kalori, protein 3,4 gram, lemak 9,4 gam dan

karbohidrat 32,2 gram. Ginger cookies ini di makan 6 biskuit pada pukul 07.00 Wita dan 6 biskuit pada pukul 19.00 wita pada ibu hamil. Hasilnya, rasa mual akan berangsur-angsur menghilang, jahe di berikan paling lama 3 minggu terbukti efektif untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil.

Tahapan inovasi ini yakni melakukan pembuatan serbuk jahe kering dari jahe dayak, pembuatan ginger cookies, pengemasan dan pelabelan serta pemasaran dan promosi melalui media sosial dan beberapa UMKM.

Inovasi ini sangat berguna bagi kesehatan, manfaatnya dapat mengurangi masalah mual

dan muntah pada ibu hamil. Mengingat rentannya seorang wanita hamil dan keterbatasan penggunaan obat-obatan selama kehamilan membuat inovasi ini dapat menjadi salah satu solusi agar ketidaknyamanan yang terjadi berkurang dan memiliki efektifitas yang baik karena selain bahan dasar yang digunakan (jahe Dayak) telah diidentifikasi kandungannya melalui penelitian, inovasi ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan dosis harian ibu hamil dalam mengurangi mual dan muntah.

Selain itu, pembuatan ginger cookies juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari bahan baku yang digunakan dengan mengolahnya menjadi ginger cookies. (Redaksi)

SIKANGURU (SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN GURU)

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MALINAU DAN TANA TIDUNG

Juara III Kategori Perangkat Daerah Lomba Inovasi Daerah 2023

Layanan administrasi di kantor Cabang Dinas Pendidikan selama ini masih menganut pola dan sistem lama yang konvensional yang berbasis kertas, sehingga banyak dikeluhkan terutama oleh para ASN yang berprofesi guru karena kerepotan dengan dokumen porto polio yang selalu di fotocopy berulang-ulang, kadang tercecer/terselip, sehingga ditolak karena dianggap tidak lengkap. Kerepotan ini semakin besar dirasakan oleh para pengguna layanan administrasi yang bertugas di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yang berada di wilayah perbatasan negara atau wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota Kabupaten, dimana kantor cabang dinas pendidikan wilayah Malinau dan Tana Tidung berada dan masih sulit akses transportasi.

Kondisi geografis yang sulit ini membuat mereka membutuhkan waktu minimal 3 hari kerja hanya untuk menyeter berkas dokumen kenaikan pangkat, dokumen penilaian angka kredit, permohonan cuti dan berkas lain sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Hal ini tentu kontra produktif dan mengurangi pencapaian kinerja mereka karena harus meninggalkan siswa dan tanggung jawab mengajarnya untuk perjalanan itu, selain itu mereka harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar yang tentu saja mengganggu anggaran belanja rumah tangganya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan terobosan inovasidenganmembuatprogram transformasi layanan kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan *progressif performance*, melakukan perubahan sistem dan prosedur layanan administrasi dan non administrasi yang selama ini lamban dan rumit menjadi sistem yang lebih progressif berupa penerapan aplikasi SIKANGURU (Sistem Informasi Kepegawaian Guru) dan program PS3 (Pojok Solusi 3) yang manfaatnya dapat memacu akselerasi kinerja di kantor cabang pendidikan dan kebudayaan wilayah Malinau-Tana Tidung.

Manfaat dari inovasi ini yaitu mengedukasi para pegawai yang ada di kantor cabang Dinas Pendidikan dan semua pegawai organisasi bawahan kantor cabang untuk terbiasa memberikan layanan prima yang efektif, efisien dan sistematis serta melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Manfaat lainnya kantor cabang dapat menjadi inspirasi dan atau rujukan/model bagi satuan perangkat kerja yang lain diberbagai tingkatan dan wilayah sebagai model manajemen layanan birokrasi yang baik.

Dalam sistem aplikasi SIKANGURU memuat Pemberkasan Data PNS Terpusat (PENDAPAT), Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (PESAKAI), Pengajuan Cuti (PETI), Pembuatan

Kenaikan Pangkat (PENGIKAT), Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (PERKALA), Data Pemetaan Guru (DAPUR), dan Tanda Tangan Dokumen (TAMENG). SIKANGURU bersifat teknis operasional, dapat ditangani oleh pegawai administrasi/operator kantor cabang yang sudah ada. Sedangkan layanan progressif untuk non administrasi dengan program Pojok Solusi atau *Solution Corner PS 3* (P : Pojok S : Solusi 3:3 menit untuk pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan cabang/ : atau, 30:30 menit untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan koordinasi kewenangan dengan bagian atau birokrasi yang setara atau lebih tinggi), dan Ticketing Pengaduan (TIGA), Karena program ini bersifat non teknis dan membutuhkan kemampuan komunikasi personal yang solutif, improvisasi dan kecerdasan memahami masalah secara komprehensif, serta memberikan problem solving yang cepat, maka Pojok Solusi atau *Solution Corner PS 3* harus ditangani langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Transformasi Layanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Malinau dan Tana Tidung memiliki 3 (Tiga) pentahapan terdiri dari: pentahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pentahapan jangka pendek merupakan tahap awal yang akan dilaksanakan untuk

JELA



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

MENIKMATI INDAHNYA PESONA PANTAI KAYU ANGIN

Sebagai kawasan perbatasan dan diapit segitiga emas: Tawau Sabah (Malaysia), Tawi-Tawi (Filipina) dan Brunei Darussalam, Provinsi Kaltara dinilai dapat memainkan peran yang strategis dalam konstelasi ekonomi maupun geopolitik di kawasan tersebut melalui pembangunan pariwisata.

Berbagai potensi unggulan yang dimiliki wilayah ini harus dapat dikembangkan secara optimal dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang kuat di Kaltara. Provinsi Kaltara diharapkan menjadi etalase negara sekaligus jembatan penghubung dari ketiga negara tersebut.

Salah satu obyek wisata yang berpotensi dikembangkan adalah

Pantai Kayu Angin. Lokasi dari wisata Pantai Kayu Angin ini tepatnya berada di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pulau Sebatik sendiri merupakan beranda terdepan NKRI di perbatasan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Untuk mengakses wisata Pantai Kayu Angin ini, cukup mudah. Bisa menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil. Lahan parkir yang sudah disediakan cukup luas sehingga tak perlu khawatir akan kesulitan mencari tempat parkir.

Di objek wisata tersebut, wisatawan disuguhkan dengan pemandangan laut yang bersih dan air laut kebiruan. Tiupan

angin sepoi-sepoi menjadi Pantai Kayu Angin selalu dirindukan pengunjungnya.

Dengan pemandangan alam yang indah, membuat Pantai Kayu Angin selalu terlihat ramai di akhir pekan atau di hari libur. Objek wisata ini pun selalu dijadikan pilihan tempat berlibur bersama keluarga atau lokasi *outbound* bagi pemda, perusahaan maupun organisasi.

Dengan perpaduan keindahan alam, kekayaan budaya, dan pengalaman wisata yang unik, Pantai Kayu Angin menjadi destinasi liburan yang menarik bagi para wisatawan yang mencari petualangan baru. (AS)

AJAH



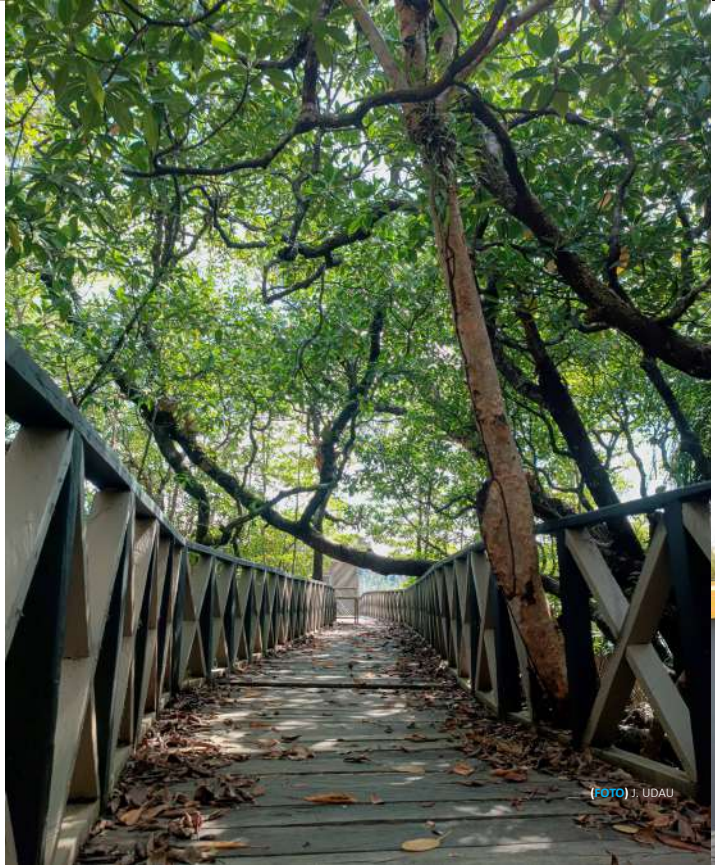
POTRET



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

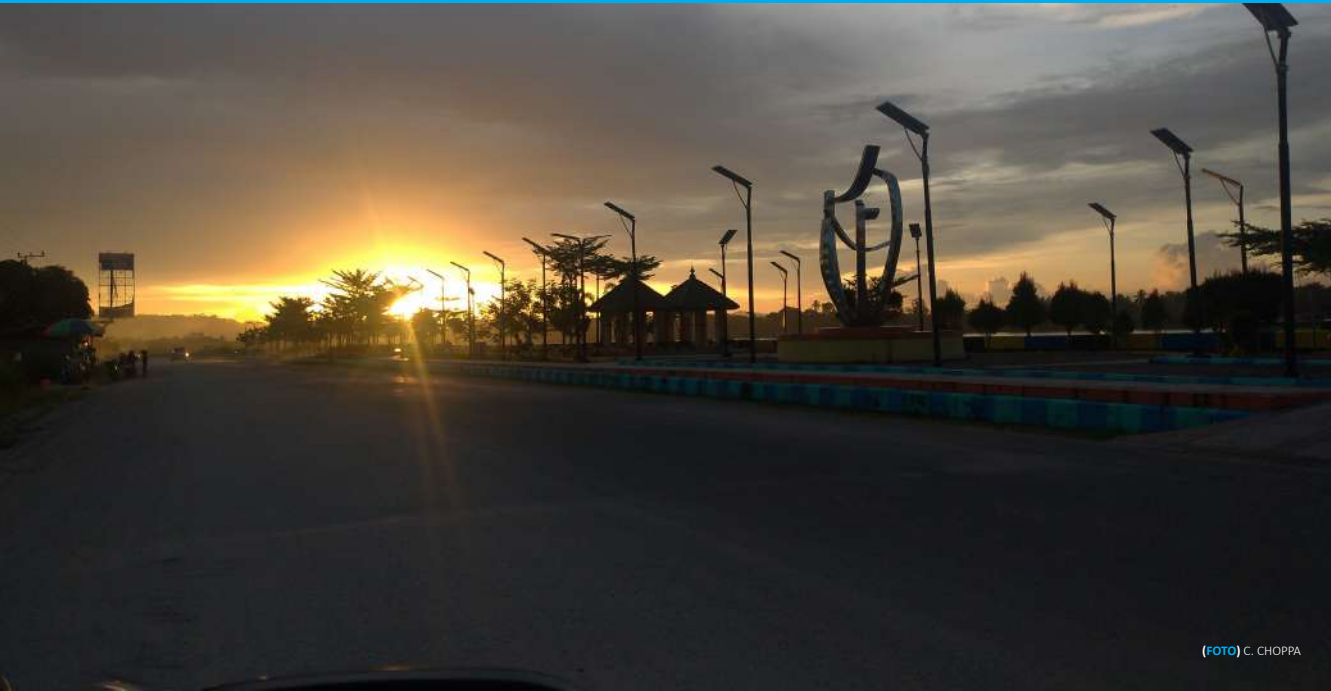
Tata ruang dan lingkungan hidup sangat erat kaitannya, keduanya mengandung arti yang sangat luas, karena kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya.

Dalam upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik.



(FOTO) UDAR

RUANG



(FOTO) C. CHOPPA



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

BANGUN SINERGI LESTARIKAN BUDAYA ASLI DAERAH



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

Kerukunan Besar Bangen Tawai (KKBT) merupakan kelompok organisasi sub Suku Kenyah Uma Lasan yang dibentuk dengan berlatar belakang rasa kekhawatiran terhadap kelestarian budaya Uma Lasan yang semakin terancam bahkan musnah seiring kemajuan zaman, akibat pernikahan beda budaya serta munculnya fenomena urbanisasi, dan berkurangnya rasa cinta terhadap budaya asli daerah yang dianggap kuno.

Untuk menjaga kelestarian budaya dan menggali peninggalan budaya dari sub Suku Kenyah Uma Lasan upaya-upaya pun dilakukan dengan mengadakan kegiatan pertemuan yang rutin diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dalam pertemuan ini orang-orang yang merupakan keturunan Uma Lasan yang tersebar diseluruh penjuru dunia dapat hadir dan terlibat

dalam setiap acara pada kegiatan tersebut. Hal yang menarik adalah pembiayaan kegiatan ini merupakan murni dari donasi kelompok masyarakat Uma Lasan. KKBT pada bulan Januari 2024 lalu telah menetapkan kepemimpinan khusus wilayah Kabupaten Bulungan.

Pada bulan Juli tahun 2023 lalu, ditetapkan Ibu Maylenty Wempi sebagai ketua KKBT untuk tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan pimpinan dalam KKBT ditentukan dengan mengumpulkan beberapa orang yang dianggap memiliki pengaruh besar bagi masyarakat, kemudian berdiskusi terkait fungsi masing-masing pimpinan.

Selanjutnya menetapkan orang-orang yang memimpin menjalankan fungsi-fungsi yang ada untuk ditetapkan dengan pelantikan/pengukuhan oleh pimpinan KKBT dan disaksikan oleh masyarakat Uma Lasan.

Dalam kondisi tertentu, pemimpin-pemimpin ini akan berkumpul untuk memecahkan persoalan yang berpengaruh terhadap kelompok Uma Lasan sebagai contoh menyelesaikan isu pendidikan dalam upaya membangun kualitas SDM dengan memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak yang merupakan anggota kelompok masyarakat KKBT.

Selain itu, terkait isu politik membantu menjaga lingkungan tetap kondusif di masa tahun politik, serta isu sosial budaya dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kelompok masyarakat. Demikian cara kelompok Suku Kenyah Uma Lasan dalam menentukan pemimpin kelompok dan menyelesaikan isu-isu didalam kelompok masyarakat. Hal ini merupakan cerminan kekuatan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. (LM)

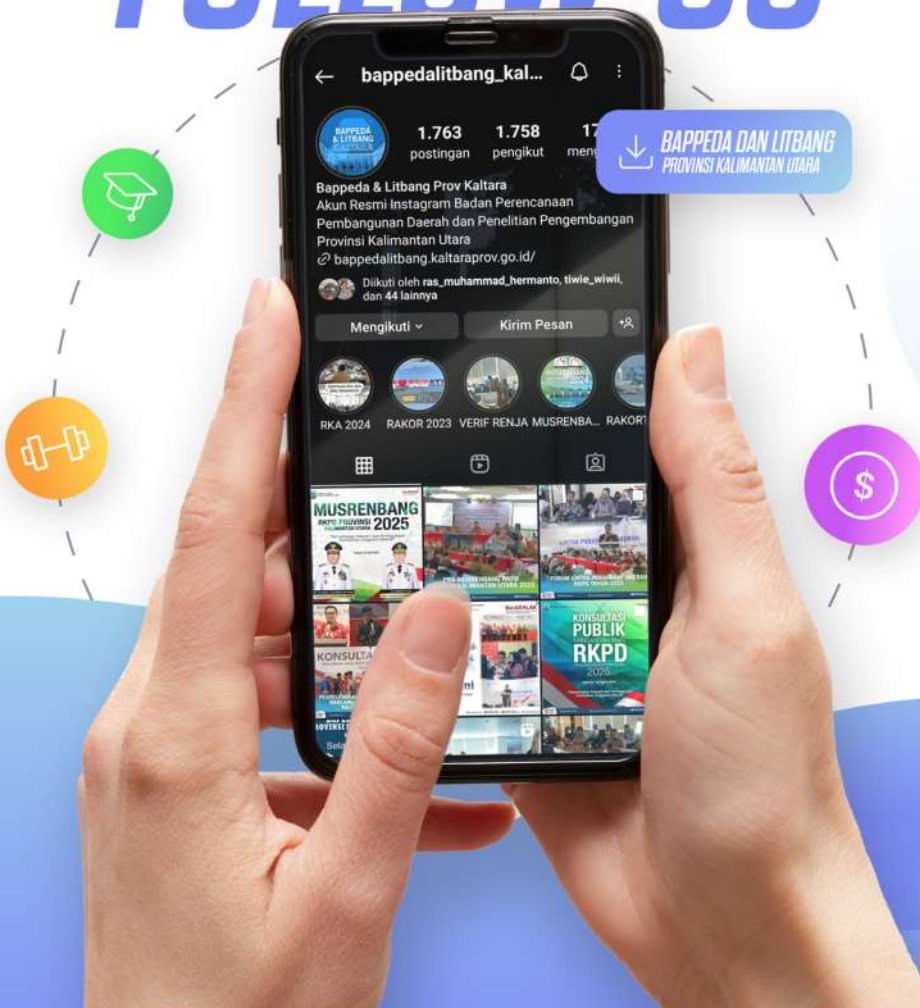


PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

DAPATKAN INFORMASI TERBARU
SEPUTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



FOLLOW US





#KALTARADIHATI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BULETIN

LENSA PEMBANGUNAN

